

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Implementasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara**

Implementasi menurut KBBI yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan dalam pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksanaan rencana yang telah ditata serta disusun secara cermat dan rinci. Kata implementasi sendiri berasal dari bahasa Inggris “*to implement*” yang artinya mengimplementasikan. Implementasi sendiri merupakan suatu pelaksanaan kegiatan yang akan dituju melalui perencanaan yang telah di tata dan di susun sedemikian rupa sebelumnya.

“Pembinaan adalah suatu proses penggunaan manusia, alat peralatan, uang, waktu, metode dan sistem yang didasarkan pada prinsip tertentu untuk pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan daya dan hasil yang sebesar-besarnya” (Musaneff, 1991, hlm. 11).

Pembinaan secara umum merupakan kegiatan terencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, pembinaan secara studi kasus biasa nya dilakukan untuk membina manusia yang baik menjadi lebih baik, arti pembinaan disini lebih merubah karakter seseorang ke arah tujuan yang akan dicapai.

“Kesadaran adalah sikap seseorang yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya” (Hasibuan, 2012, hlm. 193). Kesadaran secara umum adalah sadar akan sesuatu, sadar yang dimaksud adalah kepekaan terhadap lingkungan disekitar, kesadaran seseorang terlihat ketika orang tersebut mematuhi aturan serta norma yang berlaku di sekitar masyarakat.

Dalam pembukaan Undang Undang Dasar Tahun 1945 menyatakan bahwa tujuan nasional adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang

berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau disingkat menjadi sishankamrata, yang menempatkan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia sebagai kekuatan yang utama dan rakyat sebagai komponen cadangan serta pendukung, dimana setiap warga negara Indonesia mempunyai kewajiban untuk dapat ikut serta dalam upaya mempertahankan bangsa dan negara. Undang Undang Nomer. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara menjelaskan bahwa sistem pertahanan negara merupakan sistem pertahanan yang bersifat semesta atau yang disingkat menjadi sishanta yang melibatkan seluruh warga negara Indonesia, wilayah, sumber daya manusia dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara matang dan menyeluruh oleh pemerintah pusat atau daerah dan diselenggarakan secara terpadu, total, terarah dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.

Kesadaran bela negara merupakan suatu hal yang penting dan utama demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan, kesadaran warga negara akan bela negara dapat dilihat ketika terwujudnya kesadaran dalam upaya bela negara. Bela negara terwujud ketika warga negara memenuhi hak dan kewajibannya dalam upaya bela negara. Segenap warga negara Indonesia melaksanakan hak dan kewajibannya akan menjadi modal yang sangat besar untuk kelangsungan bangsa dan negara dalam rangka memperjuangkan segenap tumpah darah Indonesia, kedaulatan Indonesia, serta wilayah Indonesia. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatur tentang upaya bela negara dalam Pasal 30 Ayat 1 : “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara” dan Pasal 27 Ayat 3 : “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara”.

Upaya kesadaran bela negara terus dilakukan dalam pembinaan kesadaran bela negara sebagai tujuan untuk mewujudkan warga negara Indonesia akan kesadaran, pemahaman, serta keyakinan akan hak dan kewajiban bela negara oleh warga negara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berusaha maju dan unggul dalam setiap kelangsungan hidup di peradaban. Peradaban yang maju dapat terlihat atau terwujud ketika warga negara melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara tercapai. Hal yang wasiatkan oleh pendiri bangsa Indonesia (*Founding Father*) adalah masyarakat dan bangsa yang baik (*Good Society and Nation*), damai, adil, serta sejahtera, hal tersebut terdapat dalam pembukaan UUD 1945. Dalam UUD 1945 dapat dilihat bahwa UUD 1945 memberikan landasan serta arah bangsa Indonesia dalam penyelenggaraan dan pengembangan sistem pertahanan dan keamanan negara. Pertahanan dan Keamanan negara dapat terlihat dalam UUD 1945 mengenai pandangan bangsa Indonesia kedepan, meliputi diri bangsa beserta ligkungannya, keterlibatan warga negara, tujuan negara, serta sistem pertahanan negara. Hal tersebut merupakan bentuk serta sikap bangsa Indonesia dalam menentang segala bentuk yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan pada hak asasi manusia, keadilan dan kesejahteraan, serta segala bentuk penjajahan.

Widodo (2011, hlm. 19) menjelaskan definisi dari bela negara sebagai berikut:

Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dilandasi rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, keyakinan Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, kerelaan berkorban guna menghadapi setiap ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan (ATHG) baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan Negara, keutuhan wilayah, yuridiksi nasional dan nilai – nilai luhur Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945. Pengertian ini memberi kesempatan yang seluasluasnya kepada setiap warga negara untuk melakukan aktifitas bela negara.

“Berdasarkan definisi di atas, dapat dikatakan bahwa bela negara sebenarnya merupakan sebuah keharusan bagi setiap warga negara. Artinya, membela negara merupakan sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap warga negara. membela negara harus diutamakan dibandingkan dengan membela diri pribadi dan keluarganya. .... (Subagyo, 2015, hlm. 59).

Subagyo (2015, hlm. 59) menjelaskan tentang bela negara sebagai berikut:

Dalam konteks Indonesia, bela negara dipahami sebagai sikap dan perilaku warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, terpadu dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara serta keyakinan akan Pancasila sebagai ideologi negara guna menghadapi ancaman baik yang berasal dari luar maupun dalam negeri yang membahayakan dan mengancam kedaulatan baik kedaulatan di bidang biologi, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara. Nilai-nilai yang tercermin dalam bela negara adalah: cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan awal bela negara secara psikis maupun fisik.

Widodo (2011, hlm. 19) menjelaskan tentang hak dan kewajiban bela negara sebagai berikut:

Tiap-tiap warga Negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, demikian antara lain amanah UUD 1945. Artinya setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan bela negara tidak pandang laki-laki / perempuan, pekerjaan maupun profesinya, tua maupun muda, ulama maupun umaro, pejabat maupun penjahat, politisi maupun polisi, sipil maupun militer. Dengan demikian bela negara bukan monopoli salah satu kelompok profesi, pekerjaan, golongan, ras, etnik. Sehingga pengertian bela negara sangat luas, supaya mampu mengakomodasi semua golongan, maupun kelompok kepentingan.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara yang disingkat menjadi PPBN merupakan pendidikan dasar bela negara untuk menumbuhkan rasa kecintaan warga negara kepada tanah air Indonesia, kesadaran kepada bangsa dan negara Indonesia, serta keyakinan dalam ideologi Pancasila, serta keikhlasan dan rela berkorban demi bangsa dan negara. Tujuan pendidikan pendahuluan bela negara merupakan wujud bela negara oleh

warga negara yang memiliki sikap, tekad, teratur, terpadu, dan menyeluruh untuk meniadakan setiap ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negara yang dapat membahayakan kedaulatan, kesatuan, serta kesatuan bangsa dan negara.

Pendidikan Pendahuluan Bela Negara bermaksud guna menumbuhkan kesadaran bela negara kepada seluruh warga negara Indonesia, pelaksanaan PPBN merupakan langkah untuk warga negara mempersiapkan hak serta kewajibannya dalam bela negara yang baik dan benar, PPBN bisa dikatakan sebagai bekal untuk warga negara agar dapat menunaikan hak dan kewajiban nya sebagai warga negara Indonesia.

Pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara, Kementerian Pertahanan atau Kemhan melaksanakan pendidikan serta pelatihan bela negara untuk organisasi kepemudaan, organisasi masyarakat, serta tokoh adat di wilayah Indonesia. Pendidikan kesadaran bela negara diberikan kepada tokoh yang berpengaruh di lingkungan pendidikan atau sekolah, lingkungan pekerjaan atau profesi, serta pada lingkungan pemukiman di masyarakat.

Lingkungan pendidikan diberikan kepada tokoh sekolah, seperti Guru maupun Kepala Sekolah, dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA, dengan tujuan pendidikan pembinaan kesadaran bela negara dimasukan kedalam mata pelajaran yang akan diampu oleh guru. Lingkungan pendidikan kesadaran bela negara juga diberikan kepada lingkungan Perguruan Tinggi, yang diberikan kepada tokoh universitas seperti Rektor atau Dosen yang akan mengampu tentang kesadaran bela negara yang akan di masukan kedalam mata kuliah yang di barengi dengan pendidikan kewarganegaraan. Bimbingan jasmani pendidikan kesadaran bela negara untuk lingkungan Perguruan Tinggi di fasilitasi dengan Unit Kegiatan Mahasiswa atau UKM, yang didalam nya terdapat Pramuka, Menwa, dan yang lainnya, dengan tujuan kesadaran bela negara dapat disosialisasikan serta diintegrasikan dilingkungan nya masing- masing.

Lingkungan profesi atau pekerjaan diberikan kepada petinggi di lingkungan kementerian atau lembaga Pemerintah Daerah, Badan Usaha

Milik Negara/Badan Usaha Milik Swasta, dengan tujuan yang serupa agar kesadaran bela negara dapat tersosialisasikan serta terintegrasikan.

Lingkungan pemukiman atau masyarakat, pembinaan kesadaran bela negara diberikan kepada Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Budayawan, Organisasi Masyarakat, Partai Politik, serta yang lainnya dengan tujuan yang sama untuk pendidikan pembinaan kesadaran bela negara kepada bangsa dan negara Indonesia.

Pembinaan Kesadaran Bela Negara memiliki maksud serta tujuan untuk menumbuhkan kesadaran bela negara warga nya terhadap bangsa dan negara, kesadaran bela negara yang ditumbuhkan melalui proses pendekatan, sosialisasi serta motivasi untuk mencintai tanah air yang rela berkorban dalam pembelaan negara. Proses pendekatan, sosialisasi serta motivasi dapat dikatakan berjalan baik bilamana warga negara menunjukkan kecintaan warga negara terhadap bangsa dan negara, paham akan bela negara, serta menunjukkan keunggulan dan kelebihan dalam membela bangsa dan negaranya.

Bela negara dapat dikatakan wajib dilakukan oleh warga negara, setiap warga negara wajib memperkuat pertahanan negara terutama ketika ada ancaman yang berupa fisik yang datang mengancam kedaulatan negara, negara yang kuat akan terus kokoh dan tegak berdiri, pertahanan yang lemah justru akan mengancam kedaulatan negara, peran warga negara atau masyarakat sangat dibutuhkan dalam membela negara demi kelangsungan bangsa dan negara untuk melindungi kedaulatan negara.

Bela negara merupakan hal yang sangat penting yang tidak akan bisa dilepaskan, karena bela negara merupakan suatu kesatuan dalam pertahanan keamanan negara. penyelenggaraan pertahanan dan keamanan negara di Indonesia di dasarkan kepada kesadaran warga negara akan hak dan kewajiban nya sebagai warga negara. Kesadaran bela negara dapat ditumbuhkan melalui motivasi agar dapat mencintai tanah air dengan tidak adanya paksaan dari pihak lain. Tumbuhnya motivasi dilingkungan masyarakat untuk bela negara dapat ditentukan melalui sejarah panjang Indonesia, mulai dari jaman kerajaan hingga jaman penjajahan, wawasan

nusantara, prestasi bangsa, kedudukan geografis, keadaan potensi sumber daya alam hingga sumber daya manusia, perkembangan teknologi, perkembangan bangsa, dan yang lainnya.

Konsep bela negara disusun serta dikonsepsi oleh perundang-undangan dan petinggi negara. Konsep yang disusun merupakan persoalan mengenai patriotisme serta nasionalisme dari seseorang, kelompok hingga seluruh komponen dari suatu negara yang berkaitan dengan upaya mempertahankan bangsa dan negara. Konsep bela negara diartikan sebagai upaya atau peran aktif warga negara terhadap bangsa dan negara. Baik secara fisik maupun secara non fisik. Secara fisik dilakukan dengan cara mempertahankan negara dari serangan fisik atau agresi militer dari pihak yang mengancam kedaulatan bangsa dan negara. Secara non fisik dilakukan dengan cara berperan sebagai warga negara yang aktif dalam memajukan bangsa dan negara melalui pendidikan, sosial, moral, budaya beserta yang lainnya, secara non fisik berarti berperan sebagai orang yang memajukan kesejahteraan rakyat hingga terwujudnya masyarakat yang makmur.

Bela negara merupakan suatu tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, serta terpadu dengan dilandasi cinta akan tanah air Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Bela negara dilakukan dengan wajib disertai dengan kesadaran berbangsa dan bernegara, hakikat dari kata kesadaran merupakan kesiapan seluruh warga negara yang rela berkorban serta bersedia demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

Era globalisasi saat ini banyak memiliki *perubahan* dalam konteks bela negara serta dalam kemajuan bangsa dan negara. Perubahan yang dibawa oleh era globalisasi saat ini memiliki dampak yang negatif hingga positif. Perubahan yang positif dapat dikatakan demikian jika dampak tersebut baik dan bermanfaat bagi masyarakat atau warga negara Indonesia. Sedangkan perubahan yang negatif akan dikatakan demikian jika dampak tersebut membawa kearah yang tidak bermanfaat atau tidak baik bagi masyarakat atau warga negara Indonesia.

Berkaitan dengan bela negara salah satu sasaran yang paling penting dibela oleh setiap warga negara beserta pemerintah yaitu adanya wilayah negara. Wilayah negara atau teritorial yaitu wadah atau alat bagi berlangsungnya kegiatan bela negara. Wilayah merupakan unsur yang sangat penting untuk negara, dan penduduk, serta pemerintah sebagai unsur yang lainnya.

“*Oppenheim-Lauterpacht* berpendapat bahwa unsur-unsur pembentuk (konstitutif) negara yaitu harus ada rakyat, daerah (wilayah), pemerintah yang berdaulat, dan harus ada pengakuan oleh negara lain (deklaratif)”. (Andrianto, 2015, hlm. 33).

Bela negara dapat dilakukan serta dilaksanakan pada diri setiap warga negara Indonesia yaitu dengan adanya rasa cinta tanah air kepada bangsa dan negara Indonesia, serta adanya kesadaran serta rela berkorban akan bangsa dan negara Indonesia, serta meyakini Pancasila sebagai ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia yang dipercayai sebagai pemersatu bangsa dan negara.

Implementasi bela negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat diwujudkan dengan tindakan-tindakan yang konkrit dan masuk akal sesuai dengan konteks era globalisasi saat ini. Pelaksanaan bela negara yang dilakukan pada era globalisasi saat ini harus didasari oleh kesadaran berbangsa dan bernegara, rela berkorban demi segenap bangsa dan negara, meyakini ideologi Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara.

Setiap warga negara Indonesia memiliki hak serta kewajiban dalam melakukan kegiatan bela negara yang telah diatur dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia serta undang-undang. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 Pasal 9 ayat 1 mengandung makna bahwa dari undang-undang tersebut seluruh warga negara dapat dipaksakan oleh negara dengan keadaan tertentu untuk dapat ikut serta dalam pembelaan bangsa dan negara.



Andrianto (2015, hlm. 33) menjelaskan tentang landasan hukum wajib bela negara sebagai berikut:

Landasan hukum wajib bela negara untuk warga negara Indonesia seperti dituliskan sebagai berikut.

1. UUD 1945 Pasal 27 ayat (3): “Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara”.
2. UUD 1945 Pasal 30 ayat (1) dan (2): “Bahwa tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Pertahanan dan Keamanan Negara, dan Usaha Pertahanan dan Keamanan Negara dilaksanakan melalui Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta oleh TNI dan Kepolisian sebagai Komponen Utama, Rakyat sebagai Komponen Pendukung”.
3. Amandemen UUD 1945 Pasal 30 ayat 1-5 dan pasal 27 ayat 3.
4. Tap MPR No.VI Tahun 1973 tentang konsep Wawasan Nusantara dan Keamanan Nasional.
5. Undang-Undang No.29 tahun 1954 tentang Pokok-Pokok Perlawanan Rakyat.
6. Undang-Undang No.20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Hankam Negara RI. Diubah oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1988.
7. Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 6B: “Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.
8. Undang-Undang No.56 tahun 1999 tentang Rakyat Terlatih.
9. Tap MPR No.VI Tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dengan POLRI.
10. Tap MPR No.VII Tahun 2000 tentang Peranan TNI dan POLRI.
11. Undang-Undang No.3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

Keberadaan, keutuhan, keberlangsungan serta kedaulatan Bangsa dan Negara Republik Indonesia dengan wajib dipertahankan oleh seluruh warga negara. Indonesia merupakan bangsa yang telah merdeka dan berdaulat yang telah diakui oleh bangsa dan negara di dunia. Sebagai warga negara berhak dan wajib untuk membela negara dalam upaya mempertahankan kedaulatan negara, wilayah, serta kehidupan dan keselamatan bangsa dan negara.

Subagyo (2015, hlm. 2) menganalisis tentang bela negara secara filosofis sebagai berikut:

Secara filosofis, bela negara merupakan sebuah implementasi dari teori kontrak sosial atau teori perjanjian sosial tentang terbentuknya negara. Dalam pandangan para penganut teori kontrak sosial dinyatakan bahwa negara terbentuk karena keinginan warga negara atau masyarakat untuk melindungi hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat agar supaya terjalin hubungan yang harmonis, damai, dan tentram. Setiap warga negara memiliki kepentingan, masing-masing kepentingan pasti berpotensi menimbulkan konflik kepentingan di tengah masyarakat. Negara dihadirkan oleh kesepakatan atau perjanjian antara warga negara di tengah masyarakat untuk melindungi hak dan kewajiban warga negara serta untuk menjamin tidak adanya konflik kepentingan antar individu di tengah masyarakat.

Setiap warga negara di Indonesia harus memiliki pengetahuan serta memahami bentuk-bentuk upaya bela negara yang dijalankan oleh pemerintah setempat. Era globalisasi yang membawa dampak positif dan negatif terhadap warga negara Indonesia memiliki dampak yang mengarah kepada ancaman bagi bangsa dan negara Indonesia, dampak yang datang tidak hanya dari luar, bahkan dampak tersebut dapat juga di dapat dari dalam negeri. Dampak yang datang tersebut dapat mengakibatkan ancaman terhadap kedaulatan negara dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan kehadiran era globalisasi tersebut warga negara diharuskan bersikap waswas serta aktif dalam kegiatan bela negara demi mempertahankan bangsa dan negara. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara telah diatur pada Pasal 9 ayat (2) UURI Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan Negara.

Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara melalui pendidikan kewarganegaraan telah dilaksanakan sejak pendidikan SD (Sekolah Dasar) hingga pendidikan SMA (Sekolah Menengah Pertama)/sederajat, bahkan pendidikan kewarganegaraan juga dilaksanakan di perguruan tinggi. Pelatihan dasar kemiliteran di lingkungan kampus atau perguruan tinggi dilaksanakan dengan wadah UKM (Unit Kegiatan Mahasiswa) yaitu organisasi MENWA (Resimen Mahasiswa), dengan itu warga negara yang terdidik oleh pendidikan telah

melaksanakan kegiatan bela negara yang diharapkan oleh pemerintah demi kelangsungan bangsa dan negara di masa depan.

Para tenaga professional seperti atlet, dokter, guru, dosen, beserta yang lainnya sesuai dengan profesi masing-masing dibutuhkan untuk mendukung terbentuknya bela negara, terutama ketika terjadinya ancaman non-fisik yang datang. Kinerja yang profesional dapat menciptakan keamanan atau ketahanan di lingkungan masyarakat, dari mulai ekonomi, energi, pangan, kesehatan, hingga pendidikan.

Gambaran yang konkrit melalui bidang profesi dapat dilihat dengan contoh yang dilakukan oleh atlet, atlet dari mulai daerah hingga mewakili negara Indonesia di kancah dunia, dapat dilihat sebagai bentuk bela negara untuk memperjuangkan harkat dan martabat di kancah dunia melalui bidang olah raga, lalu ada guru, yang dilakukan oleh guru sesuai dengan profesinya yaitu melaksanakan kegiatan pendidikan agar terciptanya masyarakat yang cerdas akan perkembangan ilmu-ilmu yang sudah ada, selanjutnya adalah dokter, yang dilakukan oleh dokter merupakan hal yang sangat baik untuk kehidupan warga negara, yang dilakukan oleh dokter merupakan kegiatan untuk tetap melestarikan masyarakat yang sehat dari berbagai penyakit yang ada di lingkungan masyarakat.

Bela negara yang dijalankan oleh aparatur negara seperti TNI hingga Polri merupakan kegiatan atau bentuk bela negara yang nyata akan keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara dari ancaman dari dalam hingga luar. TNI melaksanakan tugas sebagai aparatur negara yang melindungi segenap bangsa dan negara dari luar, TNI melaksanakan kegiatan tersebut demi melindungi kedaulatan dan wilayah bangsa dan negara Indonesia. POLRI melaksanakan tugas sebagai aparatur negara yang bertugas untuk menciptakan keamanan rakyat dari dalam, yang dilakukan oleh POLRI merupakan aparatur negara untuk mempertahankan ketertiban dan keamanan di dalam lingkungan bermasyarakat.

## **B. Pengetahuan Tentang Komando Rayon Militer**

### **1. Pengertian Koramil**

Komando Rayon Militer atau yang sering disingkat dengan sebutan KORAMIL merupakan satuan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang berada di tingkat kecamatan, yang langsung berhubungan dengan pejabat kecamatan dan kelurahan/desa, serta berhubungan langsung dengan masyarakat. Komando Rayon Militer berada di bawah kendali Komando Distrik Militer atau yang sering disebut dengan KODIM.

Upaya pertahanan dan keamanan negara, Tentara Nasional Indonesia menganut doktrin SISHANKAMRATA (Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta) hal tersebut merupakan upaya pergerahan seluruh kekuatan nasional untuk menjamin kelangsungan bangsa dan negara Indonesia serta mengamankan segala usaha agar tercapai tujuan nasional.

Komando Rayon Militer memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan sishankamrata di wilayah kecamatan, Komando Rayon Militer memiliki tugas pokok dalam melaksanakan serta menyelenggarakan pembinaan teritorial dan perlawanan rakyat yang meliputi geografis, demografis, kondisi lingkungan sosial masyarakat, serta bela negara dalam menciptakan ruang dan alat yang baik serta tangguh di daerah kecamatan dan kelurahan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan bangsa dan negara.

Satuan Komando Kewilayahan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat mulai dari Komando Daerah Militer, Komando Rayon Militer, Komando Distrik Militer, serta Komando Rayon Militer berperan besar dalam membantu pemerintah menjalankan program pengembangan dan pembangunan nasional. Melalui Satkowil yang berada dan tersebar di wilayah Indonesia, proses pembangunan harus memiliki keamanan yang baik, satkowil yang berperan membaca lingkungan masyarakat untuk menangkal terjadinya kegiatan-kegiatan atau kelompok-kelompok yang bertentangan dengan kedaulatan negara, seperti terorisme, sapatisme, dan radikalisme dapat di tangani oleh satkowil. Babinsa yang berperan di

paling depan atau ujung tombak di tengah masyarakat, maka segala pergerakan yang dapat membahayakan kedaulatan negara dapat diatasi dengan tepat.

## 2. Tugas Koramil

Tugas Komando Rayon Militer merupakan penyelenggara pembinaan teritorial dalam rangka mendukung tugas dari tugas pokok Komando Distrik Militer. Komando Rayon Militer melaksanakan serta menyelenggarakan tugas pembinaan teritorial di wilayah kecamatan melalui berbagai program kerja serta kegiatan pembinaan kesadaran berbangsa serta bernegara melalui pemahaman yang dalam tentang nilai-nilai kebangsaan serta pembinaan kesadaran bela negara yang berdasarkan cinta tanah air serta semangat nasionalisme yang memahami serta meyakini Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia.

Pembinaan perlawanan rakyat tentang kemanunggalan TNI-Rakyat yaitu melalui pemahaman jati diri, TNI dari rakyat yang berjuang bersama rakyat berjibaku untuk mempertahankan bangsa dan negara, serta TNI yang berbuat demi kepentingan rakyat, pembentukan Tentara Nasional Indonesia berasal dari rakyat, yang kembali bekerja untuk rakyat pula, disisi lain TNI tidak hanya bertugas di sisi perbatasan negara, namun juga dari wilayah terkecil kecamatan hingga kelurahan.

Kartini, Zohran (Vol. 19, 2018, hlm. 310) menjelaskan tentang peran TNI sebagai komponen bangsa sebagai berikut:

TNI sebagai salah satu komponen bangsa, turut berperan serta melaksanakan berbagai upaya melalui Pembinaan Teritorial, dimana Pembinaan Teritorial merupakan amanat dan penjabaran UU RI No 34 Tahun 2004 tentang tugas pokok TNI, disebutkan bahwa salah satu tugas TNI khususnya TNI AD dalam OMSP (Operasi Militer Selain Perang) adalah pemberdayaan wilayah pertahanan serta membantu tugas Pemerintah di daerah yang diimplementasikan melalui kegiatan Pembinaan Teritorial. TNI AD melaksanakan Pembinaan Teritorial dalam rangka mengelola potensi Geografi (sumber daya alam dan sumber daya buatan), Demografi (sumber daya manusia) dan Kondisi Sosial menjadi

kekuatan Ruang, Alat dan Kondisi (RAK) juang yang tangguh dalam rangka pertahanan negara.

### 3. Pengertian Babinsa

(Yohanes, 2015, hlm. 313) pengertian babinsa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Babinsa sebagai berikut :

Babinsa adalah pelaksanaan Danramil dalam melaksanakan fungsi pembinaan teritorial di pedesaan yang bertugas pokok melatih rakyat dan memberikan penyuluhan di bidang pertahanan negara serta pengawasan fasilitas atau prasarana untuk pertahanan negara di pedesaan. Konsep Babinsa merupakan kepanjangan dari Bintara Pembina Desa yang berada dibawah Koramil. Babinsa adalah pelaksana pembinaan teritorial yang berhadapan langsung dengan masyarakat desa serta dengan segala permasalahan yang penuh dengan kemajemukan.

Babinsa atau Bintara Pembina Desa adalah Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melaksanakan Pembinaan Teritorial di barisan depan atau ujung tombak yang salah satu tugasnya yaitu melaksanakan sosialisasi, komunikasi sosial, dan memotivasi dengan tujuan agar dapat menjaga serta meningkatkan kekuatan serta keeratan hubungan antara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat dengan segenap komponen bangsa untuk kepentingan Keamanan dan Pertahanan Negara. Sedangkan sasaran yang akan dicapai mengenai penyelenggaraan komunikasi sosial adalah terciptanya dan terwujudnya pemahaman masyarakat mengenai Pertahanan Negara akan kesadaran bela negara, serta meningkatkan sumber daya masyarakat dalam rangka menguatkan ketahanan wilayah, serta meningkatkan pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam program Bakti Tentara Negara Indonesia. Namun seiring perkembangan zaman saat ini, banyak sekali informasi dari media elektronik ataupun media masa mengenai kelompok kelompok kepemudaan yang sering bersikap tidak wajar dalam kehidupan bermasyarakat, serta kelompok kelompok yang memiliki faham yang tidak sesuai dengan pancasila dapat merusak atau bertentangan dengan adanya kedaulatan negara Indonesia ini.

## C. Tinjauan Umum Tentang Pembinaan Teritorial

### 1. Pengertian Pembinaan Teritorial

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah yang besar dan memiliki warga negara yang sangat banyak, yang sering dhadapkan yaitu mengenai permasalahan teritorial yang bersifat spesifik, permasalahan tersebut memiliki potensi akan mengancam ketahanan nasional. Untuk menjaga integritas wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia), serta mengatasi permasalahan wilayah atau teritorial yang muncul di Indonesia, TNI (Tentara Nasional Indonesia) menggunakan metode pendekatan spesifik melalui prosedur “*Geostrategi*” yang sangat baik, salah satunya merupakan (BINTER) Pembinaan Teritorial.

Dalam upaya mengantisipasi maka dilakukan cara mengembangkan dari konsep Pembinaan Teritorial yang terarah agar memperoleh suatu kekuatan wilayah, unsur geografi bersifat sebagai ruang juang, demografi bersifat sebagai alat juang, serta kondisi sosial yang bersifat sebagai kondisi juang yang kuat serta tangguh dalam penyelenggaraan pertahanan negara. pembinaan teritorial merupakan suatu pembinaan yang meliputi terhadap segenap sumber daya nasional yang mencakup wilayah geografis untuk mendukung kepentingan nasional. Pembinaan Teritorial bagi Tentara Nasional Indonesia merupakan program kerja yang dilaksanakan untuk mewujudkan ruang, alat, serta kondisi juang yang tangguh dan baik serta mewujudkan kemandirian Tentara Nasional Indonesia bersama rakyat, dalam mewujudkan ketahanan nasional Indonesia serta kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Wibowo (2016, hlm. 4) menjelaskan tentang Pembinaan Teritorial sebagai berikut :

Doktrin Teritorial Nusantara menyebutkan bahwa pembinaan diartikan sebagai tindakan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pengembangan, pengerahan, dan pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan arti kata dari

teritorial adalah bagian wilayah (daerah hukum) suatu negara dengan batas-batas tertentu. Kemudian secara luas, teritorial berarti sebagian dari permukaan bumi, terdiri atas daratan, perairan, dan ruang udara dengan batas-batas tertentu yang ditetapkan oleh suatu negara sebagai wilayah nasional. Dengan demikian sudah tersimpul unsur ruang semesta negara dengan segenap isinya (sosiogeografis), baik yang merupakan daya kekuatan maupun daya kemampuan, baik kekurangannya maupun kelemahannya, baik kualitas maupun kuantitasnya, baik yang bersifat materiil maupun spiritual.

Basuki (2008, hlm. 26) menurut buku petunjuk induk tentang Pembinaan teritorial sebagai berikut :

Pembinaan Teritorial adalah segala usaha, pekerjaan dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan serta pengendalian potensi wilayah yang diselenggarakan bersama-sama dengan seluruh komponen bangsa dalam rangka menjadikan wilayah darat sebagai ruang, alat dan kondisi juang guna kepentingan pertahanan negara aspek darat.

Sesuai dengan buku Pedoman Praktis Aparat Teritorial, dua pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pembinaan Teritorial adalah suatu usaha, kegiatan, pekerjaan, serta program kerja pengendalian potensi wilayah guna menjadikan wilayah sebagai Ruang, Alat serta Kondisi atau disingkat menjadi RAK juang untuk kepentingan pertahanan negara yang bertujuan mewujudkan kemandirian Tentara Nasional Indonesia dengan rakyat untuk mensukseskan tugas pokok serta program kerja TNI. Program kerja Pembinaan Teritorial dapat dilaksanakan oleh TNI secara mandiri ataupun juga dapat dilaksanakan dengan seksama dengan unsur-unsur masyarakat dalam mempersiapkan kekuatan pertahanan yang meliputi wilayah pertahanan serta kekuatan pendukung di dalamnya guna mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat.

Pembinaan teritorial atau BINTER merupakan program kerja yang di selenggarakan dan di laksanakan oleh Komando Rayon Militer, Pembinaan teritorial sendiri meliputi geografis, demografis, kondisi lingkungan sosial, serta bela negara, kondisi lingkungan dengan ruang lingkup kecamatan merupakan wilayah yang di naungi oleh Komando Rayon Militer. Program kerja pembinaan teritorial dilaksanakan dan di tugaskan kepada BABINSA atau Bintara Pembina Desa, babinsa



merupakan satuan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, babinsa bertugas dengan daerah operasi yang bisa dikatakan luas dalam melaksanakan tugasnya, babinsa bisa bertugas dengan satu desa, tpi juga bisa bertugas dari desa satu ke desa yang lainnya.

Secara pokok, tugas babinsa yaitu meliputi pengumpulan dan pemeliharaan data pada aspek geografi, demografi, sosial serta potensi nasional di wilayah kelurahan/desa. Hal tersebut meliputi banyak aspek sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana prasarana, hingga infrastruktur di wilayah binaannya, maka dari itu babinsa merupakan ujung tombak untuk informasi awal operasi militer, selain perang berupa operasi kemanusiaan Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat.

Herdiansah, Ummah & Simanjuntak (2017, hlm. 66) menjelaskan tentang konteks kemiliteran sebagai berikut:

Dalam konteks kemiliteran di Indonesia, sesuai amanat UndangUndang TNI terkait dengan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), tiap tiap Satuan Komando Kewilayahan (Satkowil) diberikan tugas yang salah satunya adalah perbantuan terhadap pemerintah daerah. Tugas tersebut dilakukan melalui Pembinaan Teritorial (Binter), yakni upaya pengelolaan pertahanan di daerah melalui pendekatan atau metode pembinaan dari aspek komunikasi sosial, ketahanan wilayah, dan bakti TNI. Melalui pelaksanaan tugas perbantuan terhadap pemda, Satkowil memainkan perannya dalam mendorong proses pembangunan di daerah yang berkorelasi dengan terpenuhinya berbagai kepentingan publik. Pada umumnya, masyarakat menilai keberadaan berbagai satuan teritorial Angkatan Darat di lingkungan mereka bermanfaat untuk menciptakan stabilitas keamanan. Keberadaan institusi teritorial juga berperan dalam menengahi berbagai kelompok masyarakat yang terdiri dari berbagai kepentingan yang terkadang sulit disatukan dan acapkali menimbulkan pergesekan sosial. Karena itu secara sosiologis, TNI telah berupaya melakukan restrukturisasi fungsi di tengahtengah masyarakat yaitu dengan memposisikan diri sebagai pihak yang turut menciptakan keteraturan sosial.

Keberadaan Komando Rayon Militer yang mengedepankan program kerja pembinaan teritorial memainkan peran dalam mendorong proses pembangunan di lingkungan sosial masyarakat, menanamkan jati diri bangsa Indonesia kepada masyarakat melalui proses sosialisasi dan

motivasi, yang mengharapkan masyarakat paham akan hak dan kewajiban warga negara sebagai warga negara yang cinta akan tanah air.

Tentara Nasional Indonesia merupakan komponen utama dalam pertahanan dan keamanan negara, TNI dapat diandalkan ketika negara menghadapi ancaman berupa serangan militer yang mengancam kedaulatan negara yang bermaksud meruntuhkan NKRI. TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman, berperan sebagai ujung tombak yang berada di paling depan dalam menghadapi ancaman-ancaman di era globalisasi.

## 2. Metode Pelaksanaan Pembinaan Teritorial

### a. Bhakti TNI

Widodo (2016, hlm. 8) menjelaskan tentang Bhakti Tentara Nasional Indonesia sebagai berikut :

Bhakti TNI merupakan perwujudan Dharma Bhakti TNI sebagai alat pertahanan negara dengan mendayagunakan kemampuan TNI, dilaksanakan bersama-sama instansi pemerintah terkait dan komponen bangsa lainnya dalam rangka tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP), yaitu membantu pemerintah dalam memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya sesuai dengan Sistem Pertahanan Semesta, serta membantu tugas pemerintah di daerah dalam menangani permasalahan sosial di daerah. Tujuan dari kegiatan Bhakti TNI ini adalah untuk membantu otoritas sipil dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan fasilitas umum dan juga membantu percepatan pembangunan di daerah serta mewujudkan beberapa sasaran dalam Pembinaan Teritorial.

### b. Pembinaan Ketahanan Wilayah

Widodo (2016, hlm. 9) mengatakan “Kegiatan Bintahwil merupakan bagian dari penyelenggaraan Pembinaan Teritorial yang bertujuan untuk mewujudkan ketahanan yang dinamis di suatu wilayah dengan meningkatkan kepekaan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam menangkal setiap ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang membahayakan kedaulatan dan keutuhan wilayah”.

### c. Komunikasi Sosial

Widodo (2016, hlm. 11) menjelaskan tentang komunikasi sosial sebagai berikut :

Komunikasi Sosial sebagai salah satu metode penyelenggaraan Pembinaan Teritorial merupakan wahana untuk mencapai kesepahaman dan kesamaan persepsi tentang pemberdayaan wilayah pertahanan di darat bagi seluruh komponen bangsa. Selain itu, Komunikasi Sosial bertujuan untuk mewujudkan kebersamaan dan keeratan hubungan dengan seluruh komponen bangsa serta penyampaian kebijaksanaan pemerintah yang berkaitan dengan peran, tugas, dan fungsi TNI AD dalam membantu pemerintah untuk menciptakan pemberdayaan wilayah pertahanan negara aspek darat dalam menghadapi hakikat ancaman yang mungkin timbul. Komunikasi Sosial antara prajurit TNI AD dengan seluruh komponen masyarakat perlu dijaga dan terus ditingkatkan sehingga menumbuhkan kepedulian serta kepekaan terhadap berbagai aspek geografi, demografi, dan kondisi sosial .... (Widodo, 2016, hlm. 11).

### D. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Acuan dan dasar dari beberapa teori atau pun temuan melalui berbagai hasil penelitian sebelumnya merupakan acuan yang akan digunakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai data pendukung dari penelitian ini. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan penelitian yang terdahulu dijadikan acuan mengacu tentang Kesadaran Bela Negara, Komando Rayon Militer, serta Pembinaan Teritorial. Kajian dari hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dengan peneliti, sebagai berikut :

#### 1. Penelitian Menurut Atika Purnama Sari

Dalam Atika Purnama Sari. (2016). Implementasi Peran BABINSA Terhadap Kesadaran Bela Negara : Publikasi Ilmiah Universitas Muhamaddiyah Surakarta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Menjelaskan hasil penelitiannya sebagai berikut :

“Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil yang bertugas melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah pedesaan atau kelurahan” (Kartono, 2009, hlm. 10). Kemampuan dari BABINSA (Bintara Pembina

Desa) sendiri sangat menentukan keberhasilan dari program kerja Pembinaan Teritorial tersebut, maka dari itu babinsa dalam pelaksanaan program kerjanya selalu berkoordinasi dengan aparat setempat di lingkungan desa, seperti aparat desa/kelurahan, polsek, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga kepada tokoh pemuda setempat, dengan tujuan pelaksanaan pembinaan territorial tidak terjadi kegagalan dalam pelaksanaannya. Dalam hal pembinaan kesadaran bela negara yang memiliki andil dalam tugas tersebut yaitu Baur Komsos ataupun Danramil, aparatur desa, tokoh setempat yang ikut andil, serta kamtibmas. Dalam hal ini kepala desa berperan sangat penting dalam pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di lingkungan setempat, karena kepala desa berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat di lingkungan desa serta dilaksanakan dengan benar sesuai dengan aturan yang berlaku serta dilaksanakan sesuai dengan perintah Danramil itu sendiri.

Dalam pelaksanaan bidang hankam negara peran babinsa sendiri tidak hanya berperan dalam pembinaan kesadaran bela negara saja, namun dalam penyuluhan bidang pembangunan masyarakat juga, dengan demikian aparatur desa dan kepala desa bekerja sama dengan aparat komando rayon militer terkhusus nya dengan babinsa dalam hal pembangunan desa sesuai dengan bidang hankam. Dalam pelaksanaannya penyuluhan pembangunan masyarakat di desa melalui bidang hankam yang diberikan dari babinsa kepada desa setempat telah dilaksanakan dengan benar oleh babinsa sesuai dengan mestinya. Koramil dan babinsa berperan sebagai koordinator dalam pemberian penyuluhan, setelah itu aparat desa lah yang berperan sebagai penerima dan selanjutnya dilaksanakan penyuluhan nya terhadap masyarakat oleh desa. Kepala desa dan babinsa beserta dengan aparatur desa yang lainnya berperan dalam melakukan pengawasan terhadap fasilitas serta sarana prasarana hankam dengan baik dan benar yang ada di desa. Babinsa juga memiliki salah satu tugas yaitu melaporkan mengenai kondisi sosial di lingkungan desa secara berkala pelaksanaannya. Dalam salah satu tugas tersebut babinsa bekerja

sama dengan perangkat desa, dengan hasilnya pelaksanaannya dilakukan dengan baik oleh kedua belah pihak.

Kendala yang terjadi dalam implementasi peran babinsa dalam pembinaan kesadaran bela negara yaitu banyaknya tugas serta kegiatan dari danramil ataupun babinsa itu sendiri, lalu dari sisi masyarakat dan pemuda, banyak yang terlalu sibuk berdiam dirumah ataupun yang sibuk dalam pekerjaan masing masing, dalam hal tersebut kepedulian masyarakat dan pemuda masih cukup rendah dalam kesadaran. Selain itu kendala yang dihadapi dalam implementasi peran babinsa dalam penyuluhan pembangunan masyarakat dalam di bidang hankam yaitu sama seperti halnya yang sebelumnya, masyarakat dan pemuda terlalu sibuk dalam pekerjaannya masing masing ataupun yang acuh di dalam rumah, serta dari pihak danramil ataupun babinsa banyaknya kegiatan yang dilakukan, dan dari sisi kepedulian masyarakat dinilai masih kurang dalam hal kesadaran. Selanjutnya babinsa dalam pengawasan fasilitas dan sarana prasarana hankam di pedesaan/kelurahan dalam melaporkan dari kondisi sosial secara berkala tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya.

Solusi dalam menyikapi kendala dalam mengatasi kegiatan tersebut, diadakan pendekatan serta sosialisasi kepada pemuda dan tokoh masyarakat selanjutnya dilakukan kesepakatan waktu setiap bulan ataupun setiap minggu akan diadakan pertemuan yang bertujuan akan memberi penyuluhan mengenai kesadaran bela negara agar lebih ditingkatkan lagi dalam rasa kepedulian terhadap pembangunan masyarakat dilingkungan sesuai dengan bidang hankam yang dilakukan oleh aparat desa maupun kepala desa yang bekerja sama dengan babinsa. Pelaksanaan peran babinsa mengenai pengawasan fasilitas serta sarana dan prasarana sesuai dengan hankam di desa/kelurahan tidak ditemukan kendala dalam pelaksanaannya, sehingga tidak ada solusi yang harus dilakukan. Serta selanjutnya pelaksanaan peran babinsa mengenai laporan kondisi sosial dilingkungan desa/kelurahan yang dilakukan secara berkala, tidak juga ditemukan kendala yang dihadapi, sehingga dalam pelaksanaannya tersebut tidak ada solusi yang harus dilakukan.

## 2. Penelitian Menurut Tahan Samuel Lumban Toruan dan Priyanto

Toruan dan Priyanto. (2019). Meneliti terkait kesadaran bela negara dengan judul Evaluasi Pembinaan Kesadaran Bela Negara Masyarakat di Kota Tangerang, sebagai berikut :

Pembahasan yang dilakukan oleh peneliti mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk mengetahui hasil dari implementasi pembinaan kesadaran bela negara yang dilakukan oleh aparatur terkait di Kota Tangerang yaitu Kepala Kantor Perwakilan Kemhan di Daerah Wilyah Provinsi Banten yang bekerja sama dengan Kantor Kesbangpol serta Kodil 0506/Tangerang terhadap Masyarakat Kota Tangerang yang meliputi mahasiswa serta pelajar, guru, ormas, hingga lembaga swadaya masyarakat serta dengan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan para pejabat di instansi pemerintah setempat selaku pihak yang melakukan serta mengalami dampak dari kegiatan pembinaan melalui model evaluasi CIPP dengan hasil sebagai berikut :

### a. Aspek Konteks (Perencanaan)

Subjek dan objek pembinaan kesadaran bela negara mendapat analisis mengenai jawaban yang dikelompokkan dalam enam kelompok yang terdiri dari guru, mahasiswa, pelajar, ormas dan lembaga swadaya masyarakat, serta pejabat instansi pemerintah yang terkait dengan aspek perencanaan sebagai pemangku kepentingan yang terkait dalam penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara yang telah dijelaskan apa dari tujuan serta sasaran dari rencana yang diberikan kepada masyarakat terkait pembinaan kesadaran bela negara. selain itu juga pemangku kepentingan yang terkait juga mendapatkan masukan dari objek soal pembinaan kesadaran bela negara soal apa tujuan serta sasaran terkait dengan perencanaan pembinaan kesadaran bela negara dengan tujuan dapat memiliki kesadaran bela negara di wilayah Kota Tangerang Provinsi Banten.

Dari hasil jawaban yang telah ditemukan memiliki berbagai variasi mulai dari terimplementasi dengan baik, cukup baik serta kurang

baik. Dari enam responden yang memberikan pendapat, dua pendapat menghasilkan baik, tiga mendapat hasil cukup baik, serta satu pendapat hasil kurang baik. Dari keseluruhan kesimpulan tersebut lebih di dominan oleh pendapat yang menghasilkan cukup baik. Sehingga dalam keseluruhan dari kesimpulan tersebut aspek mengenai perencanaan pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat Kota Tangerang telah terimplemantasi dengan cukup baik. Sehingga hasil dari evaluasi mengenai aspek perencanaan nya tersebut dengan cukup baik selanjutnya akan mempengaruhi dalam evaluasi yang selanjutnya mengenai aspek masukan (Persiapan)

b. Aspek Masukan (Persiapan)

Subjek dan objek pembinaan kesadaran bela negara mendapat analisis mengenai jawaban mengenai aspek masukan atau persiapan yaitu bahwa pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan terhadap pembinaan kesadaran bela negara telah menjelaskan mengenai bagaimana pengorganisasian mengenai kegiatan, rencana kegiatan, dukungan dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana prasarana pelaksana kegiatan, pengendalian mengenai kegiatan pembinaan kesadaran bela negara terhadap masyarakat.

Dari hasil jawaban yang telah ditemukan memiliki berbagai variasi mulai dari terimplementasi dengan baik, cukup baik serta kurang baik. Dari enam responden yang memberikan pendapat, satu pendapat menghasilkan baik, empat mendapat hasil cukup baik, serta satu pendapat hasil kurang baik. Dari keseluruhan kesimpulan tersebut lebih di dominan oleh pendapat yang menghasilkan cukup baik. Sehingga dalam keseluruhan dari kesimpulan tersebut aspek mengenai aspek masukan atau perencanaan pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat Kota Tangerang telah terimplemantasi dengan cukup baik. Sehingga hasil dari evaluasi mengenai aspek

masukannya tersebut dengan cukup baik selanjutnya akan mempengaruhi dalam evaluasi yang selanjutnya mengenai aspek proses (Pelaksanaan)

c. Aspek Proses (Pelaksanaan)

Subjek dan objek pembinaan kesadaran bela negara mendapat analisis mengenai jawaban mengenai aspek proses atau pelaksanaan yaitu bahwa pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan terhadap pembinaan kesadaran bela negara telah menjelaskan mengenai bagaimana pengorganisasian mengenai kegiatan, rencana kegiatan, dukungan dari sumber daya manusia dalam pelaksanaan kegiatan, dukungan sarana prasarana pelaksanaan kegiatan, pengendalian mengenai kegiatan pembinaan kesadaran bela negara terhadap masyarakat.

Dari hasil jawaban yang telah ditemukan memiliki berbagai variasi mulai dari terimplementasi dengan baik, cukup baik serta kurang baik. Dari enam responden yang memberikan pendapat, satu pendapat menghasilkan baik, lima mendapat hasil cukup baik, serta hasil nihil atau tidak ada pendapat hasil kurang baik. Dari keseluruhan kesimpulan tersebut lebih didominasi oleh pendapat yang menghasilkan cukup baik. Sehingga dalam keseluruhan dari kesimpulan tersebut aspek mengenai aspek Proses atau Pelaksanaan pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat Kota Tangerang telah terimplementasi dengan cukup baik. Sehingga hasil dari evaluasi mengenai aspek proses atau pelaksanaannya tersebut dengan cukup baik selanjutnya akan mempengaruhi dalam evaluasi yang selanjutnya mengenai aspek produk atau hasil.

d. Aspek Produk (Hasil)

Subjek dan objek pembinaan kesadaran bela negara mendapat analisis mengenai jawaban mengenai aspek produk atau hasil yaitu bahwa pemangku kepentingan yang terkait penyelenggaraan



terhadap pembinaan kesadaran bela negara telah berhasil meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap tanah air yang di lihat sikap masyarakat itu sendiri dalam kecintaannya terhadap produk dalam negeri, mencintai lingkungan hidup sekitar masyarakat, serta mampu melakukan hidup yang bersih. Selanjutnya apakah telah berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kesadaran berbangsa dan bernegara yang dilihat sikap menghormati atau toleransi terhadap sesama warga negara, sikap satu dengan sikap yang lainnya, serta mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi serta golongan. Selanjutnya apakah telah berhasil meningkatkan masyarakat akan ideologi pancasila sebagai ideologi negara Indonesia dapat dilihat dari sikap menjalankan kewajiban sebagai hak dan kewajiban warga negara dalam sikap kesadaran bela negara, sikap menjalankan kewajiban warga negara yang beragama sesuai dengan sila pertama dengan menjalankannya dengan kewajiban dan kepercayaan secara baik sesuai dengan anjuran agamanya masing-masing, serta kesadaran masyarakat dalam membantu sesama di lingkungan masyarakat sebagai warga negara yang baik akan kepedulian. Serta apakah telah terlaksana apakah berhasil meningkatkan kemampuan masyarakat terhadap kemampuan awal bela negara.

Dari hasil jawaban yang telah ditemukan memiliki berbagai variasi mulai dari terimplementasi dengan baik, cukup baik serta kurang baik. Dari enam responden yang memberikan pendapat, satu pendapat menghasilkan baik, lima mendapat hasil cukup baik, serta hasil nihil atau tidak ada pendapat hasil kurang baik. Dari keseluruhan kesimpulan tersebut lebih di dominan oleh pendapat yang menghasilkan cukup baik. Sehingga dalam keseluruhan dari kesimpulan tersebut mengenai aspek produk atau hasil pembinaan kesadaran bela negara di masyarakat Kota Tangerang telah terimplemantasi dengan cukup baik. Oleh karena itu, dalam

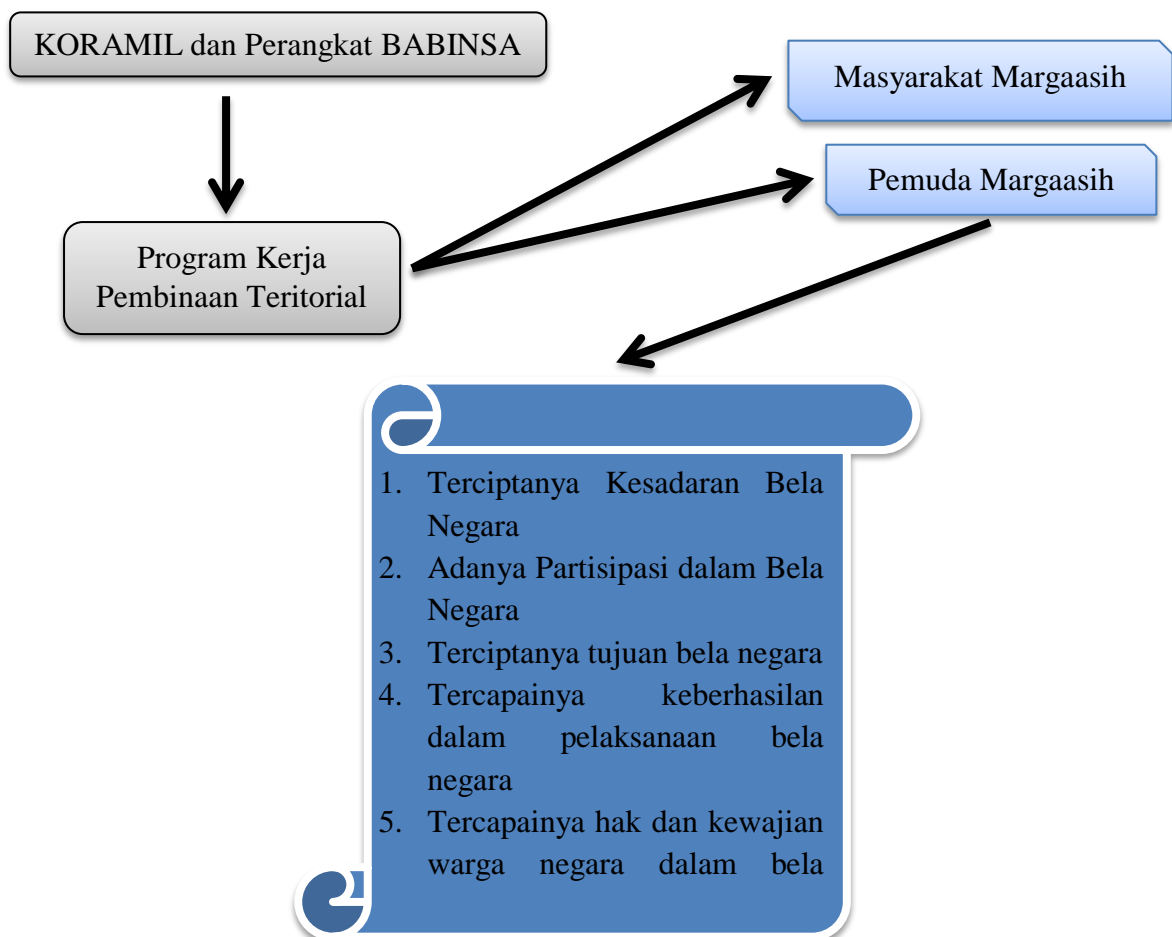
pembinaan kesadaran bela negara di Kota Tangerang belum mendapatkan hasil yang tinggi, sehingga masyarakat cenderung lebih sedikit akan kesadaran bela negara, dikarenakan pengimplementasian bela negara lebih banyak menghasilkan cukup baik dari berbagai responden yang telah di teliti.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan kajian teori yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan penelitian ini kedalam beberapa kerangka berfikir yang terdiri dari :

1. Adanya sebuah problematika yang cukup mendasar mengenai kesadaran bela negara sendiri dari masyarakat kepada bangsa dan negara. Komando Rayon Militer Angkatan Darat yang memiliki peran yang sangat penting terhadap masyarakat dalam pelaksanaan kesadaran bela negara, dengan pengetahuan yang luas, serta pengalaman yang baik dalam usaha bela negara. Penelitian ini membahas tentang perspektif bela negara dari pandangan KORAMIL serta analisis dari KORAMIL mengenai kesadaran bela negara di masyarakat. Penelitian ini berusaha memberi gambaran serta penjabaran arti data-data yang terkumpul dengan memperhatikan serta merekam aspek yang akan diteliti dengan menggunakan metode observasi (pengamatan), wawancara, serta studi dokumentasi. Data yang dimaksud adalah bagaimana peran KORAMIL dalam memberikan metode kesadaran bela negara kepada masyarakat di lingkungan kelurahan margaasih, dengan tujuan masyarakat menjalankan hak dan kewajibannya dalam membela bangsa dan negara.
2. Adanya sebuah permasalahan yang cukup besar dari masyarakat itu sendiri, permasalahan tersebut meliputi:
  - a. Masyarakat yang tidak peka terhadap kesadaran bela negara, itu yang akan menjadi suatu permasalahan dalam pelaksanaan bela negara.

- b. Masyarakat acapkali menganggap hal yang remeh dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bela negara, serta acapkali memandang negara dari satu sisi, tanpa berfikir negara dari sisi yang lain.
3. Kurangnya partisipasi dan antusias dari masyarakat dan pemuda setempat dalam memenuhi hak dan kewajiban dalam membela bangsa dan negara, masyarakat yang memiliki kesadaran yang rendah dalam hal bela negara, karena masyarakat sering kali mendapat asumsi, serta doktrin dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat yang memiliki daya talar yang rendah mudah terpengaruh dan terhasut oleh asumsi yang di berikan oleh kelompok-kelompok tersebut.



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber : Peneliti Sendiri

## **F. Asumsi dan Hipotesis Penelitian**

### **1. Asumsi penelitian**

Ada beberapa yang di kembangkan dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Asumsi penelitian mengenai kesadaran bela negara sendiri, melihat bahwa kesadaran bela negara merupakan hal yang sangat penting untuk berlangsungnya bela negara. Kesadaran bela negara merupakan pendewasaan warga negara terhadap bangsa dan negara yang di bela. Secara pandangan objektif perangkat BABINSA yang di tugaskan oleh KORAMIL menekankan pembelajaran mengenai kesadaran dalam membela bangsa dan negara, sehingga masyarakat atau pemuda di lingkungan tersebut mendapatkan motivasi yang baik untuk kelangsungan hak dan kewajiban membela bangsa dan negara.
- b. Ketika pembinaan kesadaran bela negara berangsur terus menerus diberikan kepada masyarakat dan pemuda setempat dengan metode dan analisis yang benar, maka dapat diperkaya wawasan masyarakat dan pemuda setempat tersebut. Dengan masyarakat dan pemuda yang memiliki rasa kecintaannya terhadap bangsa dan negeri dampaknya akan menciptakan generasi penerus yang baik di masa depan untuk kelangsungan bangsa dan negeri.
- c. Apabila implementasi pembinaan kesadaran bela negara yang di terapkan dan di aplikasikan kedalam bentuk program kerja KORAMIL oleh BABINSA sesuai dengan ekspektasi, maka masyarakat akan terhindar dari asumsi dan doktrin dari kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab yang dapat menurunkan kadar kecintaannya terhadap bangsa. KORAMIL melalui program kerja BINTER (Pembinaan Teritorial) menyusun program mengenai bela negara terhadap masyarakat yang berkualitas agar terciptanya warga negara yang baik sesuai dengan hak dan kewajiban bela negara.
- d. Melalui upaya pembinaan kesadaran bela negara yang di berikan oleh KORAMIL kepada masyarakat secara bertahap, seharusnya masyarakat mendapatkan pendidikan bela negara tidak hanya dari KORAMIL saja, melainkan dari pejabat daerah pula, maka dari itu pemerintah daerah harus memiliki program yang sama dalam

menanamkan masyarakat untuk dapat membela bangsa dan negara. Namun setidaknya jika pemerintah tidak memiliki program untuk bela negara kepada masyarakat, maka mendukung secara penuh program kerja pembinaan teritorial yang dijalankan dan ditugaskan oleh KORAMIL.

## 2. Hipotesis penelitian

Sesuai dengan permasalahan penelitian yang sudah dikembangkan di atas, maka selain akan mencoba menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini di rumuskan hipotesis yang akan di uji berdasarkan hasil dan data penelitian, hipotesis berkaitan dengan pertanyaan mengenai subjektifitas dan kurangnya pemahaman masyarakat dan pemuda dalam memahami bela negara serta upaya kesadaran bela negara dari KORAMIL kepada masyarakat untuk bangsa dan negara, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

- a. Jika masyarakat paham secara komprehensif mengenai kesadaran bela negara serta objektif melihat pandangan dalam membela bangsa dan negara secara benar dan cermat, maka tidak akan ada lagi masyarakat yang mudah di beri asumsi dan di doktrin oleh kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab untuk memusuhi negara yang dapat merusak kedaulatan negara.
- b. Pembinaan kesadaran bela negara yang diberikan secara terstruktur serta sistematis harus diberikan kepada masyarakat, karena masyarakat merupakan aktor yang sangat vital untuk kelangsungan hidup bangsa dan negara sebagai warga negara yang taat akan hukum dengan dilandasi rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara, maka masyarakat yang diberikan pendidikan kesadaran bela negara secara tepat, masyarakat akan secara responsif terhadap kesadaran bela negara, dan memiliki bekal serta kemampuan yang dalam untuk meneruskan kelangsungan hidup bangsa dan negara.

- c. Pembinaan kesadaran bela negara harus tetap diberikan kepada masyarakat dengan kualitas yang baik, karena masyarakat merupakan dan pemuda merupakan generasi penerus bangsa, jika pembinaan kesadaran bela negara dapat terlaksana dengan baik oleh masyarakat dan pemuda setempat, maka program kerja Pembinaan Teritorial telah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan.
- d. Jika pembinaan kesadaran bela negara secara bertahap terlaksana sebagaimana mestinya, maka akan menciptakan sebuah konsepsi yang sangat baik. Kesadaran bela negara yang dijalankan melalui program kerja Pembinaan Teritorial oleh KORAMIL melalui BABINSA akan secara maksimal jika program kerja tersebut dapat di dukung penuh oleh pemerintah daerah setempat, karena program kerja tersebut memiliki tujuan yang baik demi kelangsungan bangsa dan negara.